

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada akhir dekade 1990-an terlihat jelas bahwa masalah-masalah kemiskinan, kelaparan dan kesenjangan sosial masih sangat nyata. Diperlukan koordinasi dan komitmen bersama terutama bagi negara-negara Global South untuk mengatasi hal ini, dan pemberian bantuan yang sudah dilakukan selama ini tidak lagi cukup (Bracho, Carey, Hynes, Klingebiel, & Trzeciak-Duval, 2021, pp. 341-358). Sebuah dokumen pada tahun 1996 yang berjudul “*Shaping the 21st Century: The Contribution of Development Co-operation*” dikeluarkan oleh DAC (*Development Assistant Committee*), sebuah unit organisasi yang berada di dalam OECD (*Organisation for Economic Co-operation and Development*), organisasi yang awalnya dibentuk untuk mengkoordinir *Marshall Plan* di Eropa namun kini beranggotakan Amerika Serikat dan juga Kanada. Dokumen ini menekankan pentingnya visi dan tujuan bersama yang terkoordinir di level tertinggi untuk menjawab tantangan upaya pembangunan internasional secara menyeluruh. Mengangkat masyarakat dunia dari kemiskinan, kelaparan, dan tantangan-tantangan kemanusiaan adalah kunci kemajuan bagi seluruh penduduk dunia. (DAC OECD, 1996).

Dalam dokumen tersebut, ada 7 (tujuh) tujuan utama yang disarikan dari tujuan-tujuan konferensi PBB sepanjang satu dekade terakhir. Melalui berbagai diplomasi tingkat tinggi di forum-forum bilateral dan multilateral, negara-negara

anggota DAC kemudian melakukan berbagai lobby untuk mencapai kesepakatan dan membawa dokumen dan tujuan-tujuan ini ke negara-negara lain. Pada tahun 2000, dokumen *Shaping the 21st Century* telah menjadi *blueprint* dari konsensus yang kemudian menjadi dokumen “*A Better World for All*” dan menjadi dokumen pertama yang ditandatangani oleh OECD, UN, IMF dan World Bank, diluncurkan oleh Kofi Annan pada pertemuan persiapan Millenium Summit di Juli 2000. Tujuan-tujuan tersebut kemudian dideklarasikan menjadi Millenium Development Goal (MDG) pada tahun 2001, dengan sedikit perubahan (Bracho, Carey, Hynes, Klingebiel, & Trzeciak-Duval, 2021, pp. 341-358).

Tujuan-tujuan MDG adalah, menanggulangi kemiskinan dan kelaparan, mencapai pendidikan dasar untuk semua, mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, menurunkan angka kematian anak, meningkatkan kesehatan ibu, memerangi HIV/AIDS, malaria, dan tuberculosis, memastikan kelestarian lingkungan hidup, dan mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan. Berdasarkan laporan PBB pada tahun 2015, sebagian besar tujuan ini sudah tercapai. Contohnya tentang kemiskinan ekstrim. Data awal dari tahun 1990 menunjukkan ada lebih dari 47% penduduk negara berkembang berada dalam kemiskinan ekstrim. Tahun 2015, angka ini berkurang menjadi hanya 14% saja (UN, 2015). Pencapaian MDG yang luar biasa menunjukkan bahwa adanya kerja sama antarnegara dengan tujuan yang sama dan terukur dapat memajukan umat manusia, dan menimbulkan momentum untuk mewujudkan agenda “*no one left behind*”.

Sebagai kelanjutan dari *Millenium Development Goals* (MDG), pada bulan September 2015 para kepala negara yang bergabung di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menandatangani *Sustainable Development Goals* (SDG) atau yang sering disebut sebagai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Istilah “Pembangunan Berkelanjutan” atau *Sustainable Development* sendiri dijelaskan oleh dokumen yang diterbitkan oleh *World Commission on Environment and Development* (WCED) – sebuah komisi yang dibentuk oleh PBB atas mandat Sidang Umum PBB dalam Resolution 38/161 tanggal 19 December 1983 untuk membicarakan lingkungan dan permasalahan global pasca tahun 2000 (United Nations, 1987). Dokumen “*Our Common Future, Chapter 2: Towards Sustainable Development*”, mendefinisikan pembangunan berkelanjutan sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Dokumen ini juga menjelaskan dalam kesimpulannya bahwa strategi pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk mempromosikan keselarasan antar manusia dan antara manusia dan alam (United Nations, 1987). Dua puluh tahun kemudian di *United Nations Conference on Sustainable Development* (Rio+20) di Rio de Janeiro, Brazil, pada bulan Juni 2012, para negara anggota United Nations mengeluarkan sebuah dokumen *outcome* berjudul *The Future We Want*, sebuah dokumen yang memuat keputusan untuk menyusun SDG sebagai kelanjutan dari MDG yang selesai pada tahun 2015. SDG kemudian disahkan dan diadopsi pada bulan September 2015 sebagai sebuah komitmen global.

Komitmen global ini terdiri dari 17 Tujuan dan 169 target yang perlu dicapai pada tahun 2030. Tujuan-tujuan tersebut dianggap mendesak untuk semua negara, baik negara maju maupun negara berkembang, dan perlu dicapai bersama-sama dalam global *partnership*. Dikembangkan dari 8 tujuan *Millenium Development Goals* yang berakhir pada tahun 2015, *Sustainable Development Goals* yang akan berakhir di 2030 memiliki 17 tujuan yang lebih luas dan memiliki berbagai aspek mulai dari ekonomi, kemanusiaan, hingga lingkungan hidup.



Gambar 1. Tujuan SDG (*United Nations*)

Salah satu tujuan SDG yang menjadi sudut pandang dari penelitian ini adalah “pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi (*Decent Work and Economic Growth*)”. SDG ingin mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang tetap, inklusif, dan berkelanjutan, juga kesempatan kerja yang tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua orang. (United Nations Department of

Economic and Social Affairs, n.d.). Dalam komunikasinya tentang kerja layak, SDG mendefinisikan pekerjaan yang layak sebagai kesempatan bagi setiap orang untuk mendapatkan pekerjaan yang produktif dan memberikan penghasilan yang adil, keamanan di tempat kerja dan perlindungan sosial bagi keluarga, prospek yang lebih baik untuk pengembangan pribadi dan integrasi sosial. Kurangnya kesempatan kerja yang layak, investasi yang tidak mencukupi dan konsumsi yang rendah menyebabkan erosi kontrak sosial dasar yang mendasari masyarakat demokratis: bahwa semua harus berbagi dalam kemajuan. Menerapkan langkah-langkah kesehatan dan keselamatan yang memadai, mempromosikan lingkungan kerja yang mendukung adalah sangat penting untuk melindungi keselamatan pekerja. Tujuan utama dari “pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi” ini adalah untuk mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, lapangan kerja dan pekerjaan yang layak untuk semua, karena pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif dapat mendorong kemajuan, menciptakan pekerjaan yang layak untuk semua dan meningkatkan standar hidup manusia (United Nations, n.d.)

Tujuan SDG tentang pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi memiliki 12 target spesifik. Target-target tersebut antara lain: mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan keadaan nasional dan, khususnya, sekurang-kurangnya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara-negara kurang berkembang, mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi melalui diversifikasi, peningkatan teknologi dan inovasi, termasuk melalui fokus pada sektor yang bernilai tambah tinggi dan padat karya,

meningkatkan secara progresif, hingga tahun 2030, efisiensi sumber daya global dalam konsumsi dan produksi dan berusaha untuk memisahkan pertumbuhan ekonomi dari degradasi lingkungan. Selain itu juga mengambil langkah-langkah segera dan efektif untuk memberantas kerja paksa, mengakhiri perbudakan modern dan perdagangan manusia dan mengamankan larangan dan penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, termasuk perekrutan dan penggunaan tentara anak, dan pada tahun 2025 mengakhiri praktik pekerja anak dalam segala bentuknya. Target berikutnya termasuk melindungi hak-hak buruh dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman dan terjamin bagi semua pekerja, termasuk pekerja migran, khususnya migran perempuan, dan mereka yang berada dalam pekerjaan tidak tetap, meningkatkan bantuan untuk dukungan perdagangan untuk negara-negara berkembang, khususnya negara-negara kurang berkembang, termasuk melalui Kerangka Kerja Terpadu yang Disempurnakan untuk Bantuan Teknis Terkait Perdagangan kepada Negara-negara Tertinggal dan pada tahun 2020, mengembangkan dan mengoperasikan strategi global untuk lapangan kerja bagi kaum muda dan menerapkan Pakta Pekerjaan Global dari Organisasi Perburuhan Internasional (United Nations, n.d.).

Untuk memenuhi tujuan pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi dan target-targetnya, negara tidak mungkin bekerja sendirian. Bisnis sebagai mesin untuk penciptaan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi diperlukan oleh masyarakat global. Perusahaan-perusahaan yang menjunjung tinggi standar ketenagakerjaan dalam operasional dan rantai pasokannya akan menghadapi resiko lebih rendah terhadap kerusakan reputasi dan beban legalnya. Oleh karena itu,

perilaku *multinational companies* (MNC) terutama terkait komitmen mereka untuk menjaga kepatuhan terhadap ketenagakerjaan terkait erat dengan SDG ini (International Labour Organization, n.d.).

Perusahaan multinasional selama ini telah menggunakan rantai pasokan dari berbagai negara di dunia untuk mencapai efisiensi produksi dan memperoleh keuntungan yang lebih besar di negara di mana produk-produknya dipasarkan. Khususnya di bidang tekstil dan garmen, *brand* internasional menggunakan rantai produksi yang panjang untuk mendapatkan keuntungan dalam mengakses bahan baku secara langsung, dan juga mendapatkan akses ke proses produksi yang lebih murah di negara-negara berkembang di mana upah pekerja jauh lebih murah daripada negara asal mereka. Di sisi lain, tuntutan untuk melakukan produksi secara bertanggung jawab melalui program CSR di perusahaan-perusahaan multinasional membuat mereka memerlukan program monitoring di berbagai negara. Tuntutan ini datang dari berbagai NGO internasional dan aktivis buruh di berbagai negara, dan disulut oleh kasus *sweatshop* di pulau Saipan yang menyeret Nike dan Levi Strauss. Belajar dari kasus ini, perusahaan multinasional membuat *Code-of-Conduct* untuk menjamin bahwa proses produksi mereka bebas dari praktik *sweatshop* (Doorey D. J., 2011). Dalam perkembangannya, peristiwa tersebut di atas memunculkan sebuah industri baru yang disebut *Social Compliance* yakni tumbuhnya berbagai program sertifikasi kondisi ketenagakerjaan baik oleh pemilik *brands* sendiri maupun auditor pihak ketiga yang menggunakan Konvensi ILO dan hukum ketenagakerjaan di negara produksi sebagai standar *Code of Conduct* (COC) mereka. Perusahaan multinasional mensyaratkan kondisi kerja yang layak sebagai

bagian dari kontrak kerja dengan pabrik-pabrik produsen garmen yang sebagian besar beroperasi di negara-negara dunia ketiga.

Dari sisi layanan publik, fungsi pengawasan ketenagakerjaan sejatinya merupakan tugas dari pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan. Akan tetapi, hampir semua negara di seluruh dunia memiliki masalah kurangnya pengawas ketenagakerjaan. Pertumbuhan ekonomi yang cepat dan tuntutan akan kemudahan berinvestasi menyebabkan banyaknya perusahaan yang bermunculan, sehingga pemerintah semakin tak mampu mengawasi seluruh perusahaan di negaranya. Pengawasan yang dilakukan di sektor swasta melalui program *Social Compliance* sebagai tuntutan MNC, yakni para pemilik merek, menyebabkan kepatuhan ketenagakerjaan di sektor garmen dan *apparel* sebenarnya cukup tinggi. Namun ketika standar ketenagakerjaan meningkat, tentunya ini memengaruhi biaya produksi sehingga harga juga meningkat. Ketika ini terjadi, maka *order* dari MNC cenderung pindah ke negara lain yang menawarkan upah yang kompetitif dan standar ketenagakerjaan yang rendah. (ILO, 2006)

Tulisan ini akan mengambil fokus pada kondisi kerja di Bangladesh sebagai studi kasus. Bangladesh adalah negara yang terletak di Asia Selatan, berbatasan langsung di sisi Utara, Timur dan Barat dengan India, dan di Tenggara dengan Myanmar. Di Selatan Bangladesh terdapat garis pantai yang menghadap ke Teluk Bengal. Menurut data dari World Bank, Bangladesh memiliki populasi 164 juta penduduk dengan GDP sebesar US\$323,057 miliar berdasarkan data tahun 2020 (World Bank, n.d.). Ini menempatkan Bangladesh di posisi ke-38 dalam urutan peringkat GDP dunia, dan merupakan negara dengan GDP terbesar kedua di Asia

Selatan (World Bank). Namun ini tidak menyebabkan Bangladesh menjadi negara kaya. World Bank mengategorikan Bangladesh dalam negara *Lower-Middle Income Group*. Meski demikian, Bangladesh adalah salah satu negara yang berhasil mencapai target-target MDG, antara lain pengurangan kemiskinan dari 56,7% pada tahun 1991-92 menjadi 24,8% pada tahun 2015 dan kini semakin berkurang, kemajuan signifikan dalam meningkatkan pemerataan akses pendidikan dengan angka partisipasi murni 97,7 persen dan tingkat penyelesaian 81,3 persen di tingkat dasar, dan pada tahun 2015 kematian ibu menurun dari 322 pada tahun 2001 menjadi 170 pada tahun 2013, penurunan 47% yang tentunya sangat signifikan. (Bangladesh Planning Commission, Government of the People's Republic of Bangladesh, 2015). Dan pencapaian ini tidak terlepas dari pesatnya pertumbuhan industri *Ready-Made Garment* (RMG).

Industri RMG di Bangladesh berawal dari upaya negara penghasil RMG di Asia Timur yang mengalami pembatasan kuota ekspor ke Amerika Serikat dan Eropa karena upaya proteksi pasar domestik melalui kerangka GATT/WTO. Korea Selatan, salah satu negara paling terdampak, kemudian membuka pabrik di Bangladesh yang tidak terdampak kuota dan memberikan *transfer skill* tentang industri RMG ke pengusaha lokal. Kombinasi dari dukungan kebijakan pemerintah melalui berbagai pembebasan pajak, subsidi modal, dan berbagai *preferential treatment* dari negara-negara tujuan ekspor, serta minimnya upah di Bangladesh, juga meningkatnya kemampuan pekerja di Bangladesh untuk menghasilkan garmen berkualitas ekspor dengan biaya murah menyebabkan biaya produksi di negara ini sangat kecil bila dibanding dengan negara-negara kompetitornya. Keuntungan

kompetitif ini menyebabkan hampir semua *brand* internasional menempatkan produksinya di Bangladesh, sehingga menempatkan Bangladesh sebagai produsen garmen kedua terbesar di dunia setelah Tiongkok (Muhammad, 2011) (Ahsan & Ahsan, 2018) (Sarker, 2018).

Secara total kurang lebih ada 5000 pabrik garmen yang mempekerjakan sekitar 3,6 juta pekerja di Bangladesh. Namun karena tidak semua *brands* memiliki kantor dan staf di Bangladesh, banyak *social compliance audit* yang diperuntukkan untuk memonitor kepatuhan ketenagakerjaan lalu dialihkan ke perusahaan subkontraktor. Dalam praktiknya, bahkan perusahaan subkontraktor pun tidak mampu untuk menangani permintaan yang sangat banyak ini, dan kemudian melimpahkan lagi tugas ini ke para konsultan *freelance*. Akibatnya, banyak audit yang sifatnya hanya di atas kertas tanpa melakukan kunjungan lapangan ke pabrik. (Kashyap, 2018) (ECCHR, 2018)

Pada tanggal 24 April 2013, sebuah gedung berlantai delapan yang disebut Rana Plaza runtuh. Di dalam gedung ini ada bank, apartemen, beberapa toko, dan beberapa pabrik garmen yang mempekerjakan sekitar 5000 pekerja. Sehari sebelum gedung tersebut runtuh, stasiun TV lokal telah memberitakan munculnya retakan besar di gedung tersebut. Akibatnya seluruh gedung kemudian dievakuasi. Bank dan toko-toko kemudian tutup hingga keesokan harinya.

Namun kemudian pemilik gedung menyatakan gedung aman dan boleh untuk tetap dibuka. Meskipun bank dan toko-toko serta apartemen masih ditutup, pabrik-pabrik garmen tetap beroperasi. Bahkan para pemilik pabrik garmen mengancam akan memotong upah pekerja selama sebulan jika pekerja tidak masuk pada hari

itu. Pada tanggal 24 April 2013, pukul 08:57 pagi, seluruh gedung runtuh. Pada saat itu ada 3,122 pekerja di dalam gedung dan serta-merta terperangkap dalam puing-puing reruntuhan gedung. Pencarian penyintas diakhiri pada tanggal 13 Mei 2013 dengan total korban jiwa mencapai 1.134 orang. Kurang lebih 2000 orang mengalami luka berat dan ringan bahkan hingga menjadi orang dengan disabilitas yang sulit untuk mendapatkan pekerjaan lagi (Burke, 2014).

Besarnya jumlah korban luka dan korban jiwa menyebabkan bencana ini menjadi bencana paling mematikan di pabrik garmen dalam sejarah modern. *International Brands* yang produknya dikerjakan di gedung tersebut termasuk Benetton, Bonmarche, Prada, Gucci, Versace, Moncler, The Children's Place, El Corte Ingles, Joe Fres, Mango, Matalan, Primark dan Walmart. Semua *brands* ini kemudian mendapatkan kritik tajam dari seluruh dunia karena tidak mampu melindungi pekerja dalam rantai pasokan mereka, bahkan hingga kehilangan jiwa. Peristiwa ini juga memicu reformasi undang-undang ketenagakerjaan di Bangladesh dan munculnya berbagai koalisi internasional untuk memperbaiki keadaan di negara tersebut (Manik & Yardley, 2013).

Dua inisiatif besar yang merupakan kolaborasi dari berbagai elemen, yakni MNC, pemerintah, serikat pekerja dan NGO kemudian terbentuk. *Alliance* yang diinisiasi oleh para pemilik merek dagang berbasis Amerika Utara, dan *Accord* yang anggotanya merupakan para pemilik merek dagang berbasis Eropa. Kedua inisiatif besar ini kemudian melakukan berbagai aktivitas yang ditargetkan pada para pabrik yang masuk ke dalam rantai pasokan global mereka. Pembentukan *Alliance* dan *Accord* sebagai lembaga kerja sama internasional untuk mencapai

kondisi kerja layak bagi para pekerja garmen di Bangladesh dilakukan secara terkoordinasi dengan pemerintah Bangladesh dan dengan pengawasan *International Labour Organization* (ILO, 2017).

Tragedi Rana Plaza membuktikan bahwa pengawasan dari pemerintah dan swasta tidak cukup untuk mencegah situasi kerja yang buruk bagi pekerja. Kesenjangan antara negara pemberi *order* dan penerima *order*, situasi ekonomi para pemilik *brands* dan pekerja garmen di Bangladesh yang sangat berbeda membuat citra para pemilik merek selaku pemberi *order* turut hancur. Sehingga terjadi tekanan internasional yang sangat besar bagi para pemilik merek untuk melakukan sesuatu yang berbeda untuk menjamin pekerjaan layak bagi para pekerja di rantai pasokan global mereka.

1.2. Rumusan Masalah

Ketika SDG dicanangkan pada tahun 2015, dua tahun setelah tragedi Rana Plaza, terlihat bahwa PBB membawa aktor non-negara yaitu MNC sebagai salah satu pihak yang turut memengaruhi tujuan ini. Secara eksplisit, tujuan SDG tentang penyediaan pekerjaan yang layak menyebutkan bahwa bisnis merupakan aktor penting yang membuka lapangan kerja dan perlu untuk menjunjung tinggi kepatuhan terhadap perlindungan ketenagakerjaan untuk menghindari beban legal dan citra yang buruk.

Tragedi Rana Plaza juga memperlihatkan bahwa ketergantungan yang tinggi terhadap aktor non-negara dan kurangnya pengawasan dalam bidang kepatuhan tidak dapat menjamin perbaikan nasib dan perlindungan bagi buruh. Ada banyak

faktor lain yang perlu ditingkatkan untuk memperbaiki perlindungan. Penelitian ini berusaha untuk melihat keterhubungan antara pencapaian tujuan SDG tentang pekerjaan yang layak dengan kerja sama internasional yang terjadi di rantai pasokan global MNC, dengan menggunakan Tragedi Rana Plaza sebagai studi kasus. Fokus dari penelitian ini adalah bagaimana desain dari kerja sama internasional yang terjadi setelah tragedi Rana Plaza memengaruhi kondisi kerja. Oleh karena itu, berikut adalah pertanyaan penelitian yang ingin dijawab di dalam penelitian ini:

1. Mengapa kerja sama internasional penting dalam memperbaiki kondisi kesehatan dan keselamatan kerja di Bangladesh?
2. Bagaimana model kerja sama internasional antara aktor negara dan non-negara untuk memperbaiki kondisi kesehatan dan keselamatan kerja pasca Tragedi Rana Plaza?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami peran para aktor yang berbeda di level global dalam memengaruhi kondisi kerja di rantai pasokan global, khususnya di sektor industri *Ready Made Garment* di Bangladesh.

Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis model kerja sama internasional yang diterapkan di Bangladesh antara pemerintah dan MNC setelah Tragedi Rana Plaza yang dapat meningkatkan pencapaian tujuan SDG yaitu Pekerjaan yang Layak, dan menjelaskan bagaimana model tersebut dapat diterapkan di negara-negara berkembang yang juga menerima pesanan dari MNC melalui rantai pasokan global.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini ingin berkontribusi untuk menambah literatur penelitian tentang *Sustainable Development Goals* khususnya pekerjaan yang layak dan keterlibatan aktor non-negara dalam pencapaiannya. Selain itu, penelitian ini dapat memberikan temuan yang berguna untuk pengambilan kebijakan publik terutama bagi Kementerian Ketenagakerjaan untuk mengatasi permasalahan kekurangan pengawas tenaga kerja dan menggunakan model yang sama untuk melibatkan aktor non-negara demi melindungi hak-hak pekerja untuk tempat kerja yang aman dan layak.

Penelitian ini juga diajukan untuk memenuhi persyaratan kelulusan studi MHI untuk mendapatkan gelar master dari jurusan Hubungan Internasional.

1.5. Kerangka Penulisan

Penelitian ini ditulis dengan sistematika sebagai berikut:

BAB 1: PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan kerangka penulisan.

BAB 2: KERANGKA BERPIKIR

Bab ini terbagi dalam dua bagian, yaitu tinjauan pustaka yang memuat penelitian-penelitian yang relevan yang telah dilakukan sebelumnya, yang dalam penelitian ini dibagi menjadi beberapa tema yaitu: kondisi kesehatan dan keselamatan kerja buruh di Bangladesh, kelemahan dalam tata kelola kondisi kesehatan dan keselamatan kerja di Bangladesh, peran perusahaan multinasional dalam

peningkatan kondisi kesehatan dan keselamatan kerja buruh di Bangladesh, dan kerja sama internasional dalam perbaikan kondisi kesehatan dan keselamatan kerja buruh di Bangladesh. Lalu diikuti oleh bagian teori dan konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu konsep pembangunan berkelanjutan, globalisasi dan *supply chain*, kerja sama internasional, *good governance* dan *global governance*.

BAB 3: METODE PENELITIAN

Bab ini memuat metodologi yang digunakan dalam penelitian ini, termasuk pendekatan penelitian, metode penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB 4: PEMBAHASAN

Pembahasan penelitian ini terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu Bangladesh sebagai negara berkembang, kondisi kesehatan dan keselamatan kerja di Bangladesh, tragedi Rana Plaza, kelemahan sistem dalam mencegah tragedi Rana Plaza, dan skema kerja sama internasional pasca tragedi Rana Plaza.

BAB 5: PENUTUP

Pada bagian ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu kesimpulan dari penelitian berdasarkan hasil analisis data dengan landasan teori yang telah ditetapkan, dan juga saran untuk penelitian di masa depan.